PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN



RENJA TAHUN 2022



Jln.Raya Pangalengan No.04 Pangalengan Kabupaten Bandung 40378

KATA PENGANTAR

Seiring dengan perkembangan dan dinamika serta paradigma yang menuntut Institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan disisi lain pula institusi Pemerintah termasuk Kantor Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan prosedur dan kententuan.

Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan (Renja) Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021 - 2026 harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien yang berati bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan, baik pelaksanaannya maupun terhadap kinerjanya yang menghasilkan output dan outcome yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Kecamatan.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Pangalengan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan

kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindunganNya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Pangalengan, 01 Agustus 2022
Camat Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670105 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	**PENDAHULUAN**	3
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .....**	9
	2.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	34
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	57
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....**	79
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	79
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	81
	3.3 Program Kegiatan	90
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..**	102
BAB V	**PENUTUP**	113

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukan nya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis diikabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (*goals*), tetapi juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2021 secara teknis dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh kalangan adapun melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi dan nasional. dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan Desa dan Kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraanpemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pangalengan, terdiri dari 30 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 321 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022.

Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 dan juga menyelerasakan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung
15. Kepuitusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2022
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Pangalengan

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan, keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Rencana Kerja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangalengan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangalengan

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun Lalu

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah direncanakan, tujuan dari evaluasi tersebut untuk mengumpulkan data dengan standar tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Pangalengan berikut kami sajikan data secara umum meskipun terbatas pada data tertentu saja

1. Keadaan Greografik

A. Luas Wilayah

Luas Wilayah Administrasi : 27.294,76 Ha

Yang terdiri :

1. Desa Lamajang
2. Desa Tribaktimulya
3. Desa Margamulya
4. Desa Pangalengan
5. Desa Margamukti
6. Desa Sukamanah
7. Desa Banjarsari
8. Desa Wanasuka
9. Desa Margamekar
10. Desa Fulosari
11. Desa Warnasari
12. Desa Margaluyu
13. Desa Sukaluyu

B. Batas Wilayah

Utara : Kec. Kertasari Kab. Bandung

Timur : Kecamatan Cimaung Kab. Bandung

Selatan : Kec Talegong Kab. Garut

Barat : Kecamatan Pasir Jambu Kab. Bandung

C. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk : 157.924 Jiwa

Laki – laki : 79.440 Orang

Perempuan : 78.073 Orang

(Data Laporan Penduduk Tahun 2021)

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung, susunan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Sosial Budaya ;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
7. Seksi Pembangunan;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
9. Sub Bagian Program danKeuangan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional
11. Staf

Persoalan sumber daya manusia adalah ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Fungsi Kecamatan yang sekaligus Menjadi Fungsi Camat yaitu :

1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Pangalengan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 29 orang pegawai, terdiri dari 21 orang tenaga PNS, 8 Orang Tenaga Non ASN dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Perutauran Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Tenaga non ASN dan selain itu ditambah tenaga LINMAS dan Satuan Polisi Pamong praja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tenaga PNS yang ada telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disisi lain karena kebutuhan mendesak dan perlu adanya saling bantu, maka dalam pekerjaannya secara insidentil saling membantu dan saling mengisi sehingga terjalin kebersamaan yang menguatkan soliditas diantara PNS,

Capaian kinerja di Kecamatan Pangalengan tidak terlepas pula dari adanya kontribusi tenaga non ASN yang rata – rata berusia muda dan mempunyai kemampuan dibidang IT dan mempunyai akselerasi sehingga keberadaannya dapat menunjang terhadap Kinerja Kecamatan Pangalengan, perpaduan Tenaga PNS dan Non ASN di Kecamatan Pangalengan menjadi kekuatan kinerja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1
Pegawai Kecamatan berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Banpol	Linmas	Jumlah
1	Laki – laki	19	4	6	5	34
2	Perempuan	2	4	-	-	6
3	**Jumlah**	**21**	**8**	**6**	**5**	**40**

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		L/P		Jumlah
		PNS	CPNS			
1.	Gol I	-	-	L	P	-
2.	Gol II	8		8		8
3.	Gol III	10		9	1	10
4.	Gol IV	3		2	1	3
	Jumlah	**21**		**19**	**2**	**21**

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jabatan dan GolonganEselon

NO	Jabatan	JUMLAH	L/P		PANGKAT / GOL
			L	P	
1	Camat	1 Orang	L	-	Pembina Tk.1 / IVb
2	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	L	-	Pembina / IVa
3	Kasi Pemerintahan	1 Orang	L	-	Penata Tk.1 / IIId
4	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Orang	L	-	Penata / IIIc
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	L	-	Penata TK.1 / IIId
6	Kasi Pembangunan	1 Orang	L	-	Penata TK.1 / IIId
7	Kasi Sosbud	1 orang		P	Pembina Tk.1 / IVb
8	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1 Orang	L		Penata TK.1 / IIId
9	Kasubag Program dan Keuangan	1 Orang		P	Penata / IIIc
10	Pengelola Administrasi	1 Orang	L	-	Penata TK.1 / IIId

	Kepegawaian				
11	Pengelola Bantuan Keuangan Desa	1 Orang	L	-	Penata Muda TK.1 / IIIb
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 Orang	L	-	Penata / IIIa
13	Pengolah Data PM	1 Orang	L	-	Penata / IIIa
14	Bendahara Pengeluaran	1 Orang	L	-	Pengatur TK.1/II d
15	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan data sistem keuangan	1 Orang	L	-	Pengatur / IIc
16	Bendahara Penerimaan	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
17	Pengelola PBB dan BPHTB	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
18	Pengelola BMD	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
19	Pengelola Dokumentasi	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
20	Pengelola PM	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
21	Pengadministrasi Trantib	1 Orang	L	-	Pengatur muda TK.1/ II b
Jumlah		21	19	2	

Tabel 2.4
Daftar Tenaga Non ASN
Kecamatan Pangalengan Tahun 2021

No	Jabatan/Tugas Sehari – hari	Jumlah	L/P		Pendidikan	Ket
			L	P		
1	1. Tenaga Administrasi Pengadministrasi Umum 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang		P	S1	
2	1. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	L		SMA	
3	1. Tenaga Teknis Administrasi 2. Penata Laporan Keuangan 3. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	L		D3	

4	1. Tenaga Administrasi Pengelola Kesejahteraan Sosial 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang		P	S1	
5	1. Tenaga Administrasi Pengelola Pelayanan Operasional 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang		P	SMA	
6	1. Pengelola Fasilitas sosial dan umum 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang			D3	
7	1. Pengelola Layanan Operasional 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	L		S.1	
8	1. Melaksanakan Kegiatan Kebersihan Kantor 2. Membantu kegiatan lainnya	1 Orang	L		SMP	
JUMLAH		**8 Orang**	**4**	**4**		

Tabel : 2.5
Data PNS dan PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			L/P		Jumlah
		PNS	CPNS	THL	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	0
2	SMP	-	-	1	1	-	1
3	SMA	7	-	2	8	1	9
4	D3	2	-	2	2	2	4
5	S1	10	-	3	11	2	13
6	S2	2	-	-	1	1	2
	Jumlah	**21**	**-**	**8**	**23**	**6**	**29**

Dari tabel tersebut menunjukkan, Pegawai Kecamatan Pangalengan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD Sebesar 0 % , SMP sebesar 3,45 %, terdiri dari laki-laki 3,45% dan perempuan 0%, SMA sebesar 31,03 % terdiri dari laki – laki 27,59 % dan Perempuan 3,45% , D3 sebesar 13,79 %

terdiri dari laki-laki 6,90% dan perempuan 6,90%, berpendidikan S1 sebesar 44,83 % terdiri dari Laki-laki 37,93% dan Perempuan 6,90 % dan berpendidikan S2 sebesar 6,90% terdiri dari laki-laki 3,45% dan perempuan 3,45% .Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Pangalengan didominasi oleh pegawai berpendidikan S1 , Kecamatan Pangalengan sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Tabel 2.3 dan grafik di atas maka pegawai Kecamatan Pangalengan berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 % , Golongan II sebanyak 38,10 terdiri dari laki-laki 38,10% dan Perempuan 0%, Golongan III sebanyak 47,62 % terdiri dari laki-laki 42,86% dan perempuan 4,76% dan Golongan IV sebanyak 14,29 % terdiri dari laki-laki 9,52% dan perempuan 4,76 %, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Pangalengan dengan SDM tersebut cukup bisa untuk menjalankan roda organisasi yang lebih baik dan lebih maju

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Pangalengan juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pangalengan yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2020Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pangalengan Bulan Juni 2022

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim	L/P		Ket
				L/P	P	
1.	III a	1	Diklatpim TK. III	1		
2.	III b	1	Diklatpim TK. III	1		
3.	IV a	4	Diklatpim TK. IV	4		
4.	IV b	2	Diklatpim TK. IV	1	1	
Jumlah		8 orang		7	1	

A. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada umumnya, Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesionalisme;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung, Hal itu menunjukan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan subtantif, administratif dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Surat Keputusan

Bupati Nomor : 137.1/Kep. 615 -KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang salah satunya di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) Kecamatan dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Kecamatan Pangalengan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), yang seharusnya mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat, namun demikian sangat disadari bahwa sarana dan prasarana yang ada perlu adanya perbaikan dan pengadaan peralatan baru maupun rehab ruang pelayanan.

Pelayanan PATEN di Kecamatan Pangalengan pada saat ini kurang berfungsi dengan baik dikarenakan oleh adanya perangkat keras yang rusak dan Jaringan yang tidak cukup memadai. Sehingga Pelayanan menjadi kurang optimal, untuk mengatasi hal tersebut untuk Tahun 2022 akan dilakukan Perbaikan dengan Biaya dari DPA TA 2022,

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat Desa dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan dan usulan masyarakat melalui musyawarah pembangunan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan antara lain berupa, penyuluhan, sosialisasi, Bimbingan peningkatan kapasitas Lembaga

Desa, Lembaga Kemasyarakat Desa dan kader masyarakat atau kelompok masyarakat. dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

Bahwa dengan paradigma pembangunan berbasis masyarakat, pemerintah kecamatan telah mendorong lembaga Desa agar dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa dapat mengakomodir semua kepentingan dengan tetap memperhatikan skala prioritas

Untuk pemberdayaan kelembagaan, sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam pemberdayaan telah dilaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan guna pemberdayaan lembaga yang ada di Desa agar lembaga yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan dapat lebih berdaya dalam menunjang kinerja pembangunan.

Kewenangan dalam tugas umum Pemerintahan salah satunya yang tidak kalah penting adalah ketenteraman dan ketertiban umum, dalam hal ini camat melalui FORKOPIMCAM telah melakukan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang salah satunya diimplementasikan melalui Koordinasi Unsur Pimpinan Forkopimcam dan pembinaan terhadap satuan Linmas Desa serta Linmas Kecamatan.

3. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Keberadaan Lingkungan Hidup tidak bisa dipisahkan dengan permasalahannya termasuk Lingkungan Hidup permukiman, dimana pada lingkungan hidup permukiman tersebut hidup manusia dengan segala prilakunya dan bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, baik rumah, perkantoran, sekolah dan bangunan pendukung lainnya, semakin bertambahnya penduduk dan permukiman semakin bertambah permasalahan sosial termasuk masalah sosial, debet sampah semakin bertambah, tempat pembuangan akhir atau sementara belum terbangun secara merata dan bahkan di satuan lingkungan tingkat RW/RT tidak atau belum dibangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPAS/TPSS/TPPAS), sehingga pengelolaan sampah di lingkungan tidak terkelola dengan baik bahkan sampah menumpuk di selokan, di pinggir jalan

raya/jalan Desa, hal tersebut merupakan masalah lingkungan yang perlu penanganan dari para pihak baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa maupun masyarakat itu sendiri, Sampah Menjadi masalah yang terus menjadi Aktual dan selalu menjadi problematik yang belum terselesaikan karena masalah sampah perlu kesadaran masyarakat dalam kepeduliannya terhadap lingkungan hidup kawasan permukiman.

Kecamatan Pangalengan yang merupakan Wilayah yang perkembangan, sejalan dengan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Raya Provinsi Oleh Pemerintah dan Pembangunan di pelosok Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa telah berdampak positif terhadap perkembangan Wilayah Kecamatan Pangalengan sekaligus menjadi permasalahan tersendiri terhadap lingkungan permukiman dikarenakan debit sampah semakin bertambah dengan tidak diimbangi adanya infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan sampah..

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah di tingkat Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya, perlu melakukan koordinasi, kosultasi vertikal dengan dinas terkait untuk penanganan sampah, dan untuk Kegiatan yang dilaksanakan perlu adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah, baik sosialisasi mengenai regulasinya maupun pengelolaan sampah yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada, selain itu Camat akan melakukan Koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintahan Desa maupun terhadap Lembaga Desa agar penanganan sampah menjadi hal yang perlu segera dilakukan dan semua menyadari bahwa sampah selain merupakan limbah akan tetapi disisi lain dapat menjadi potensi ekonomi masyarakat.

Permasalahan sampah menjadi sangat urgen atau penting segera ditangani agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat tertangani dengan baik dan merubah dampak negatif menjadi positif dengan penanganan dan kepedulian bersama.

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana kegiatan melampaui

target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target yang dilaksanakan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 87,32%(persen) namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut kegiatanya sebagian dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid - 19 sehingga anggaran yang ada tidak terserap 100% (Persen)

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Menunjang/ tidak Menunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	518.960.728	467.528.668	90,09	Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	173.302.000	132.484.500,00	76,45	Menunjang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.680.190	13.107.500,00	95,81	Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.963.168	18.168.168,00	82,72	Menunjang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.311.612	34.311.612,00	100,00	Menunjang
Jumlah	762.217.698	665.600.448,00	87,32	

3. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

   Capaian Kinerja di Kecamatan Pangalengan yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.

5. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.**

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang megalami kerusakan
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan Data Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu (2021) sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 Kecamatan Pangalengan

KEC. PANGALENGAN

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 . 7.01.11.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase Tercapainya program pelayanan administrasi perantoran yang maksimal**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
7.01 . 7.01.11.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sumber daya air, listrik dan komunikasi	3 Jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	**-**	**-**	**-**

7.01 . 7.01.11.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servise peralatan dan perlengkapan kerja	1 thn	1 thn	8 unit	8 unit	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	1 thn	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 thn	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 jenis	14 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	12 bln	4 bh	11 jenis	11 jenis	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	13 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid	12 bln	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi box dan sneck	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 01.19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat kabar dan tabloid	12 bln	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 thn	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-

. 01.20	Dalam Daerah									
7.01 . 7.01.11.01 . 01.22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah kegiatanpenyelenggaraaPHBN	1 thn	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan routin/berkala gedung kantor	1 thn	1 thn	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 thn	1 thn	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Meningkatnya sumber daya manusia	100%	100%	100%	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemahaman peraturan perundang undangan	1 thn	1 keg	1 keg	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tertatanya administrasi pelaporan dan keuangan	1 thn	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01	Program penataan administrasi	Prosentase Terlaksananya pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

. 07	kependudukan	yang maksimal								
7.01 . 7.01.11.01 . 07.01	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pelayanan publik bidang kependudukan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 08	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Terciptanya Kebersihan Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 08.01	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Terciptanya Kebersihan Lingkungan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase intensifikasi dan ektensipikasi pendapatan hasil daerah (PAD)	100%	100%	100%	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Tersedianya SDM program intensifikasi dan ekstensifikasi	1 thn	1 thn	1 thn	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM,biaya pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	-	-	-

	KDH									
7.01 . 7.01.11.01 . 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase pembinaan olah raga	100%	100%	100%	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 51.02	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pembinaan Olah raga yang berkembang di masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan perencanaan musrenbang	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 52.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah SDM,Biaya perencanaan pembangunan musrenbang	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam siskamswakarsa	100%	100%	100%	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 56.02	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan	1 thn	1 thn	1 keg	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 57.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kerukunan antar umat beragama	1 thn	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-

7.01 . 7.01.11.01 . 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase pelaksanaan monotoring,Evaluasi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 59.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa	1 thn	1 thn	1 keg	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 59.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa	1 thn	1 thn	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 59.11	Penataan Pengelolaan dan Pendampingan manajemen dan administrasi desa (2)	Jumlah monoring,Evaluasi dan pelaporan	1 thn	1 thn	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 60.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	1 thn	1 thn	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 60.02	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 60.07	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1,00	-	-	-

	(P2TP2A)	(P2TP2A								
7.01 . 7.01.11.01 . 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase rata rata pemuda berprestase skala kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 61.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 62.01	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana penangulangan bencana	1 thn	1 thn	12 bln	12 bln	100%	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase meningkatnya kwalitas pengelola PAUD	100%	100%	100%	0	0,00	-	-	-
7.01 . 7.01.11.01 . 65.02	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kecerdasan anak usia dini	1 keg	1 keg	1 keg	0	0,00	-	-	-
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	60%	67	-
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Perangkat Daerah								
7.1.1..2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-		-	-
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Kantor	-	-	-	-	-	4 jenis	4 jenis	-
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga kantor	-	-	-	-	-	25 jenis	25 jenis	-
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Majalah	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-

7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah sumber daya air, listrik dan komunikasi	-	-	-	-	-	4 jenis	4 jenis	-
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	-	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-

7.1.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	-	-	-	-	82	82	-
7.1.2..2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	8 keg	8 keg	-
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	-			-
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-	-	-			-
7.1.4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-
7.1.4.2.02	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	-	-	-	-	-			-

	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Republik Indonesia								
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	-	-	-	-	82		-
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Kebineka Tunggal Ika Sera Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	-

7.1.5.2.01.10	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kerukunan antar umat beragama	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	-	-	-	-	82	82	-
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
7.1.6..2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah SDM Biaya perencanaan pembangunan musrenbang	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pangalengan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun Kecamatan. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Perencana di tingkat SKPD mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan berdasarkan indikator yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun(thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun(thn n-1)	Tahun(thn n)	Tahun(thn n+1)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (Nilai)	n/a	n/a	58 (B)	60 (B)	63 (B)	64 (B)	61,63 (B)	67,93 (B)			Persepsi masyarakat atas Pelayanan yang diberikan Kecamatan
2	Prosentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik (%)	n/a	n/a	92 %	94 %	94 %	95%	97,96 %	97,47 %			Hasil Penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat

3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	81%	82%	83%	82,05%	82,81%				Hasil sensus sesuai dengan data di Simda Barang
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik					77%	78%					

Sumber : LKIP tahun 2021)

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pangalengan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Pangalengan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Identifikasi masalah atau disebut juga dengan *Problem Identification* adalah suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah dengan kata lain identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang bisa dikatakan langkah paling penting diantara langkah-langkah proses yang lain. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada

mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Adapun indikator permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
1.	Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Sumber daya, pemberdayaan	Moratorium penerimaan CPNS/ belum meratanya penempatan PNS, terbatasnya diklat/bimtek peningkatan kapasitas pegawai
2.	Aset barang pemerintah	Penataan ruang pelayanan dan penataan ruangan gedung kantor, pagar kantor	Keterbatasan anggaran Kecamatan
3.	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Sarana prasarana pelayanan	Kebijakan Pemerintah, koordinasi internal dan tingkat sektoral

Pada tabel tersebut diatas, dapat kita lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya jumlah tenaga jabatan pelaksana yang terlatih untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat kurang memadai, salah satunya pelayanan langsung adminduk yaitu penataan ruang tunggu antrian pelayanan kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan Pangalengan harus sudah di laksanakan pembangunan rehab.

3. Beberapa sektor PAD masih belum memenuhi target yang semestinya, perlu optimalisasi melalui intesifikasi pajak daerah dan retribusi.
4. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, terutama Sumber Daya Manusia.
5. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, khususnya terkait **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"** dengan tugas dan fungsi Kecamatan terdapat pada Misi ke 4 (lima) yaitu **"Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan melalui birokrasi yang Propesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan "**

Tabel B- 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangalengan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Peningkatkan kualitas Sumber Daya**			
	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan Kesehatan	Kurangnya tenaga pelaksana yang Profesional untuk mempermudah dan memparlancar pelayanan kepada masyarakat.	Masih kurangnya pendukung pengolah data/ informasi hasil penelitian	Adanya jaringan internet dan sarana prasaran penunjang operasional (PC komputer/ laptop)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	**Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing**			
	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai optimalisasi	Belum adanya petugas secara khusus menangani bidangi dan memfasilatasi bidang perekonomian	Masih rendahnya motivasi terhadap peningkatan ekonomi mikro	Banyak sektor andalan yang bisa dijadikan faktor pendorong perekonomian
3	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah**			
	Meningkatkan ketersediaan dan kualaitas infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	Pemukiman padat penduduk mengancam ruang terbuka hijau menyempit. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap lingkungan	Sebagain besar wilayah kecamatan Pangalengan merupakan daerah rawan bencana	Kepedulian sebagian masyarakat dalam mendukung program pemerintah
4	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**			
	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperharikan daya dukung lingkungan daya tampung lingkungan	Pendekatan/ sosialisasi belum terlaksana dengan baik	Cepatnya pembanguna n fisik dan rendahnya kepedulian sebagaian masyarakat terhadap lingkungan	Peraturan Daerah
5	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**			

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan kinerja Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Kurangnya SDM Kecamatan	Belum merata penempatan PNS dan kurangnya pemberdayaan pegawai	Pengadaan tambahan pegawai/karyawan, Peningkatan tunjangan pegawai dan penerapan system capaian kinerja pegawai

Tabel B- 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	**Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan**	**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Kurangnya petugas pelayanan yang profesional untuk menunjang pelayanan publik	Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik serta terbatasnya rekruitmen pegawai/ petugas/ operator	Sebagain sarana prasaran pendukung telah tersedia baik komputer maupun jaringan internet

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan program pemerintah	Kurangnya sosialisasi penyelenggaraan program pemerintah kepada masyarakat	Fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program dan perencanaan pembangunan
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Pangalengan	Masih rendahnya disiplin pegawai	a. Terbatasnya sumberdaya aparatur b. Belum optimalnya inventarisasi barang/asset	Optimalisasi sumberdaya yang ada serta tersusunnya pelaporan internal

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka maka ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang diuraikan pada BAB IV Dokumen Renja 2022

2.4 Review terhadap Renja RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan Rancangan Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Renja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rancangan Renja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

Renja RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL T-C.31.

Review Terhadap Renja RKPD Tahun 2022

No	Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)
	KECAMATAN					KECAMATAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP	63	4.183.882.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP	63	4.409.495.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	65.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Pangalengan	umlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	65.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.675.353.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.900.966.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.675.353.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.900.966.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Pangalengan**	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	**100 %**	**115.602.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pangalengan**	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	**100 %**	**115.602.000**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN PANGALENGAN) (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN PANGALENGAN) (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	4.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	70.602.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	70.602.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	umlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis	5.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Barang Cetak Dan Pengganda an	12 Bulan	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	umlah Barang Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN	Kec. Pangalengan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah	12 Bulan	6.000.000

	PANGALENGAN)									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	12 Bulan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 ok	**282.880.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 ok	**282.880.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi	3 Jenis	13.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi	3 Jenis	13.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	269.880.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	269.880.000

			Kantor							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Pangalengan**	**Persentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik**	**94%**	**45.047.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik**	**94%**	**45.047.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor	12 Bulan	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pangalengan	umlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor	12 Bulan	22.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	10.547.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	10.547.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12.500.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN (A)					**4.183.882.000**	**JUMLAH PAGU ANGGARAN (A)**				**4.409.495.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**106.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**106.500.000**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100 %**	**12.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100 %**	**12.000.000**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan	**Kec. Pangalengan**	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat	1 dok	12.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	**Kec. Pangalengan**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	1 dok	12.000.000

	Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			dan Prasarana Pelayanan Umum		dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**100 %**	**94.500.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan**	**100 %**	**94.500.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	7 Kegiatan	94.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	7 Kegiatan	94.500.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**38.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**38.500.000**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec. Pangalengan**	**Persentase lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100 %**	**38.500.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100 %**	**38.500.000**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec. Pangalengan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lem	38.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec. Pangalengan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lem	38.500.000
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**4.410.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**4.410.000**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan**	**100 %**	**4.410.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan**	**100 %**	**4.410.000**

			Peraturan Kepala Daerah					**Kepala Daerah**		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Kegiatan	4.410.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Kegiatan	4.410.000
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**47.737.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**47.737.500**

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**47.737.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**47.737.500**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kec. Pangalengan	umlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945	2 Kegiatan	13.737.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN	Kec. Pangalengan	umlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945	2 Kegiatan	13.737.500

	Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN PANGALENGAN)					PANGALENGAN)				
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Kerukunan Antar Umat Beragama	12 Bulan	34.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Kerukunan Antar Umat Beragama	12 Bulan	34.000.000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Desa beradministrasi Baik**	**77%**	**25.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Desa beradministrasi Baik**	**77%**	**25.000.000**

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	1 dok	**25.000.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	1 dok	**25.000.000**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN (B)					**222.147.000**	**JUMLAH PAGU ANGGARAN (B)**				**222.147.500**
JUMLAH PAGU ANGGARAN (A+B)					**4.406.029.000**	**JUMLAH PAGU ANGGARAN (A+B)**				**4.631.642.500**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025, tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangalengani Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2022. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pangalengan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, baik dari segi administrasi kependudukan maupun mengkoordinasikan pelayanan bersifat umum diantaranya pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketertiban wilayah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 didasarkan kepada RPJP Nasional 2005-2025 yang tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Renja Pembangunan Daerah Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Usulan program kegiatan yang diusulkan berdasarkan penelaahan berbagai aspek, yang dikerucutkan terhadap program kegiatan sesuai program prioritas Kecamatan daintaranya penunjang tata kelola internal (akuntabilitas), administrasi kependudukan, pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan ketertiban umum, olahraga pembinaan kepemudaan, wawasan kebangsaan dan stabilitas politik wilayah.

TABEL T-C.32
Usulan Program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2023
KABUPATEN BANDUNG

Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status	Volume	Satuan	Pagu	Jumlah
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	4	bh	569.336,00	2.277.344,00
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	5	bh	833.175,00	4.165.875,00

			Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	17	bh	815.062,00	13.856.054,00
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	20	Buah	815.062,50	16.301.250,00
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH	Rekomendasi : agar menyampaikan	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musre	1		833.175	833.175

		RAGA	proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0							nbang Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1		833.175	833.175
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1		833.175	833.175

			: 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1		833.175	833.175
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : kekurangan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	buah	Rp 815.063	Rp 815.063
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kel	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : kekurangan Koefisie			Diteruskan ke Musrenbang	1	buah	815.063	815.063

			engkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0				n : 0 0 Anggaran : 0			Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : kekurangan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	buah	815.063	815.063
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0					Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	buah	Rp 552.000,00	Rp 552.000,00

Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	buah	Rp 2.415.000,00	Rp 2.415.000,00
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	set	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	20		833.175	16.663.500

			teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	5		815.062	4.075.310
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Keterbatasannya lahan untuk kegiatan olahraga di wilayah Desa maka diperlukan sarana			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	2	Paket	7.647.500	15.295.000

							Olahraga yang tidak membutuhkan ruangan terlalu besar Koefisien : 0 0 Anggaran : 0							
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	3	BUAH	495.075	1.485.225
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	unit	Rp 552.000	Rp 552.000

			kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	unit	Rp 552.000	Rp 552.000
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	unit	Rp 552.000	Rp 552.000
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA	DINAS PEMUDA	Rekomendasi : agar	NON BELANJA						Diteruskan	1	unit	Rp 7.647.500	Rp 7.647.500

	DAN OLAH RAGA	DAN OLAH RAGA	menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	TRANSFER						ke Musrenbang Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	unit	Rp 7.647.500	Rp 7.647.500
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1		Rp 7.647.500	Rp 7.647.500

			Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	4		Rp 569.336	2.277.345
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	4		Rp 754.688	3.018.750
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH	Rekomendasi : agar menyampaikan	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musre	9	buah	815.062	7.335.558

		RAGA	proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0							nbang Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	5	buah	833.175	4.165.875
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : PENINGKATAN EKONOMI Koefisien : 0 0 Anggara			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	3		7.647.500	22.942.500

			: 0				n : 0							
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	3	buah	Rp 833.175,00	2.499.525
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	set	Rp4.200.000,00	4.200.000
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH	Rekomendasi : agar menyampaikan	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musre	4	Buah	Rp 569.336,25	2.277.345

		RAGA	proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0							nbang Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER						Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	Buah	Rp7.647.500,00	7.647.500
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	**Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0**	**NON BELANJA TRANSFER**			**Rekomendasi : KESEHATAN Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1		7.647.500,00	7.647.500,00

			Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	**Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**	**NON BELANJA TRANSFER**			**Rekomendasi : Kesehatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	5		833.175,00	4.156.875
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	**Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**	**NON BELANJA TRANSFER**			**Rekomendasi : Kesehatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	6		754.687,00	4.528.122
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH	DINAS PEMUDA DAN	**Rekomendasi : Agar menyiapka**	**NON BELANJA TRANSFER**			**Rekomendasi : Pening**			Diteruskan ke	1		627.900,00	627.900,00

	RAGA	OLAH RAGA	**n Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**				**katan Kesehatan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0**			Musrenbang Kecamatan				
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Lapang Volly Belum tertata Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	buah	552.000	552.000
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Sarana belum komlpit Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	1	paket	4.200.000	4.200.000

			Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : peralatan belum lengkap Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	8	buah	569.336	4.554.690
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : Agar menyiapkan Proposal/kelengkapan sesuai Kriteria Teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : meningkatkan minat berolahraga bagi masyarakat Koefisien : 0 0 Anggaran : 0			Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	5	paket	7.647.500	38237500
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA	DINAS PEMUDA	Rekomendasi : agar	NON BELANJA	0					Diteruskan	13	Buah	815.062.0	10.595.813

	DAN OLAH RAGA	DAN OLAH RAGA	menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	TRANSFER						ke Musrenbang Kecamatan			00	
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0					Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	6		833.175	4.999.050
Kabupaten/Kota	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rekomendasi : agar menyampaikan proposal/kelengkapan sesuai kriteria teknis	NON BELANJA TRANSFER	0					Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	2		552.000	1.104.000

			Koefisien : 0 0 Anggaran : 0											

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2022 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Proses perencanaan yang transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target *Millennium Development Goal's* (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Pangalengan yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan

kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pangalengan adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan kegiatan setelah pagu indikatif RKPD Kabupaten ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pangalengan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

   dalam arti ukuran keberhasilan yang dipacai setiap unit kerja indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

   Penetapan standar Pelayanan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dengan indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja baik kuantitatip yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Renja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan :

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan

3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Target Kinerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas kinerja Intansi Pemerintahan (AKIP	63 Nilai
			Persentase BMD/Aset dalam Kondisi baik	94%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa beradministrasi baik	77%

3.1 Program dan Kegiatan

3.2 Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"*** dengan gerakan ***BEDAS, BEDAS, BEDAS BEDASKEUN*** sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan melalui birokrasi yang propessional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Pangalengan

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Pangalengan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 yaitu :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

TABEL T.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN BANDUNG

OPD : Kecamatan Pangalengan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Pangalengan**	**Nilai AKIP**	**63**	**4.409.495.000**	**APBD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Pangalengan**	**Nilai AKIP**	**64**	**5.045.070.682**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	65.000.000	APBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	65.000.000	

			Daerah						Perangkat Daerah			
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*6 Dok*	*2.900.000*	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*2 dok*	*2.000.000*	
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	*2 dok*	*2.160.000*	

									Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN PANGALENGAN	Kec. Pangalengan	umlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	65.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 lap	57.940.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan			3.900.966.000	APBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan			4.398.573.350	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.900.966.000	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.398.573.350	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	*Persentase Administrasi Barang*	*100%*	*10.010.000,00*	

									Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*1 lap*	*10.010.000,00*	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100%*	*47.629.000,00*	
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	*50 org*	*47.629.000,00*	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan			115.602.000	APBD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan			131.862.584	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	4.000.000	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	70.602.000	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	61.351.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	umlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis	5.000.000	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	umlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	umlah Barang Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan	5.000.000	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	umlah Barang Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan	5.510.784	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah	12 Bulan	6.000.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah	12 Bulan	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Koordinasi Dan Konsultasi	12 Bulan	25.000.000	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Koordinasi Dan Konsultasi	12 Bulan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan			282.880.000	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan			318.810.148	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi	3 Jenis	13.000.000	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi	3 Jenis	48.060.148	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	269.880.000	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	270.750.000	

			Kantor						Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik	94%	45.047.000	APBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik	94%	73.185.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pangalengan	umlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor	12 Bulan	22.000.000	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pangalengan	umlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor	12 Bulan	26.647.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	10.547.000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	15.547.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12.500.000	APBD	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	7.877.300	
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	23.113.500	
	JUMLAH PAGU ANGGARAN (A)				**4.409.495.000**	**APBD**	**JUMLAH PAGU ANGGARAN (A)**				**5.045.070.682**	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**106.500.000**	**APBD**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83%**	**132.837.500**	

	PELAYANAN PUBLIK						**PELAYANAN PUBLIK**					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Sosialisasi	1 kegiatan	12.000.000	APBD	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Sosialisasi	1 kegiatan	13.500.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12.000.000	APBD	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				13.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan			94.500.000	APBD	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan			119.337.500	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	7 Kegiatan	94.500.000	APBD	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	7 Kegiatan	119.337.500	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**38.500.000**	**APBD**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**43.000.000**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				38.500.000	APBD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				43.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				38.500.000	APBD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				43.000.000	

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**4.410.000**	**APBD**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**39.929.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan			4.410.000	APBD	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		*34.929.000*	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Kec. Pangalengan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Kegiatan	4.410.000	APBD	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	*1 lap*	*18.060.000*	

	Indonesia (KECAMATAN PANGALENGAN)								Wilayah Kecamatan			
							Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	*1 laporan*	*16.869.000*	
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*100%*	*5.000.000,00*	

							Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*1 lap*	*5.000.000,00*	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**47.737.500**	**APBD**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pangalengan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**86.537.200**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan			47.737.500	APBD	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan			86.537.200	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kec. Pangalengan	umlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945	2 Kegiatan	13.737.500	APBD	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*200 org*	*22.237.200,00*	

	Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN PANGALENGAN)											
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	umlah Kerukunan Antar Umat Beragama	12 Bulan	34.000.000	APBD	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	jumlah Kerukunan Antar Umat Beragama	12 Bulan	26.300.000	

							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan				38.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Desa beradministrasi Baik**	**77%**	**25.000.000**	**APBD**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pangalengan**	**Persentase Desa beradministrasi Baik**	**77%**	**50.117.800**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan			25.000.000	APBD	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan			50.117.800	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN PANGALENGA	Kec. Pangalengan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000	APBD	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerinta	*13 dok*	*8.009.800*	

	N)							han Desa			
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*2 dok*	*10.110.000*	
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(KECAMATAN PANGALENGAN)	Kec. Pangalengan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	1 Kegiatan	*31.998.000,00*	
	JUMLAH PAGU ANGGARAN (B)				**222.147.500**		**JUMLAH PAGU ANGGARAN (B)**				**352.421.500**	
	JUMLAH PAGU ANGGARAN (A+B)				**4.631.642.500**		**JUMLAH PAGU ANGGARAN (A+B)**					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pangalengan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangalengan

Kabupaten Bandung Tahun 2022

Kode Rekening						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Penanggung jawab	Sumber Dana	Catatan Penting
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	0	0	0	KECAMATAN		Kec. Pangalengan		4.631.642.000	Kec. Pangalengan		
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kec. Pangalengan	63	4.409.495.000	Kec. Pangalengan		
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase BMD / Asset Dalam Keadaan Baik	Kec. Pangalengan	100%	65.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	6 Dokumen	65.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	12 Bulan	3.900.966.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	12 Bulan	3.900.966.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	12 Bulan	115.602.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	1	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	10 Jenis	4.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	12 Bulan	70.602.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	20 Jenis	5.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

							Kantor						
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	12 Bulan	5.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah	Kec. Pangalengan	12 Bulan	6.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Koordinasi Dan Konsultasi	Kec. Pangalengan	12 Bulan	25.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	12 Bulan	282.880.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi	Kec. Pangalengan	3 Jenis	13.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	12 Bulan	269.880.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	Kec. Pangalengan	12 Bulan	45.047.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

						Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Kec. Pangalengan	12 Bulan	22.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Pangalengan	12 Bulan	10.547.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pangalengan	12 Bulan	12.500.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Pangalengan	83	106.500.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan sarana umum	Kec. Pangalengan	100%	12.000.000			

7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	2	03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	1 keg	12.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	2	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	7 keg	94.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	7 Kegiatan	94.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM		83	38.500.000			
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec. Pangalengan	3 Keg	38.500.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi	Kec. Pangalengan	3 Keg	38.500.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Pangalengan	83	4.410.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	4	2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	3 kegiatan	4.410.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dengan Aparat	Kec. Pangalengan	1 Kegiatan	4.410.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

						Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Pangalengan	83	47.737.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan		47.737.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945	Kec. Pangalengan	2 Kegiatan	13.737.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

						Republik Indonesia							
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	umlah Kerukunan Antar Umat Beragama	Kec. Pangalengan	12 Bulan	34.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Pangalengan		25.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	6	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	1 keg	25.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan Musrenbang	Kec. Pangalengan	1 Kegiatan	25.000.000	Kec. Pangalengan	APBD Kab.Bandung	

						JUMLAH PAGU ANGGARAN	**4.631.642.000**			

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Kerja (RENJA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Pangalengan tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan Seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra SKPD).
5. RENJA Kecamatan PangalenganTahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baikdalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akanmembutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Camat Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670105 198803 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
Jln. Raya Pangalengan No.04 Tlp-Fax. (022) 5979404
Pangalengan (40378)
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat email :
kec_pangalengan@bandungkab.go.idWebsite :
www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANGALENGAN

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PANGALENGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , terkait dengan kewajiban setiap SKPD untuk membuat Renja sebagai acuan perencanaan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) ke depan, maka untuk penyusunannya perlu dilaksanakan oleh Tim penyusunan Renja Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Pangalengan tentang Tim Penyusun Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

17. Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021 – 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rancangan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2022 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 dengan dasar dari Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan/ perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Pangalengan

Pada Tanggal : Juni 2022

Camat Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670105 198803 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANGALENGAN
Nomor :

Tanggal :

Tentang : Tim Penyusun Renja Perubahan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2022

DAFTAR KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENJA KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Penanggungjawab : Camat Pangalengan

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Pangalengan

Anggota Tim Pelaksana

: 1. Kepala Seksi Pemerintahan
: 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
: 3. Kepala Seksi Sosial Budaya
: 4. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
: 5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
: 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
: 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

Camat Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670105 198803 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
Jln. Raya Pangalengan No.04 Tlp-Fax. (022) 5979404
Pangalengan (40378)
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat email :
kec_pangalengan@bandungkab.go.idWebsite :
www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANGALENGAN

Nomor :

TENTANG
PENETAPAN RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PANGALENGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Renja Tahunan yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Pangalengan tentang Penetapan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Tahun 2014;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021;

17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017

29. Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021 – 2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Renja Perubahan Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dan Rancangan Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2022 oleh Bidang Perencanaan Bappeda, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, BAB IV Renja dan Pendanaan , BAB V Penutup, yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Bandung ;

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Pangalengan dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD Kabupaten Bandung;

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Camat Pangalengan dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Pangalengan tahun 2022.

KETUJUH : Renja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan tahun ke-4, seiring dengan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2016-2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangalengan

Pada Tanggal : 6 Juni 2022

Camat Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670105 198803 1 004

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung Kecamatan Pangalengan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
6	Penelaahan Renja RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			

8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	√			
10. a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10. b	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10. c	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	√			

13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.	√			